

ANALISIS PENGARUH BANTUAN SOSIAL (PKH DAN KUBE) TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Firda Wiku¹, Tri Oldy Rotinsulu², Een N Walewangko³

wikufirda@gmail.com

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh bantuan sosial (PKH dan KUBE), terhadap tingkat kesejahteraan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Program Keluarga Harapan merupakan subsidi terhadap pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dan kesehatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan alat analisis menggunakan Regresi Linear Berganda. Bantuan sosial yang dimaksud adalah program PKH (Program Keluarga Harapan) yang diberikan pada rumahtangga miskin untuk membantu beban pengeluaran rumahtangga terutama berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan. PKH sebagai program bantuan bersyarat membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan yang tersedia. PKH juga memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. PKH menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan. Program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang diberikan untuk pemberdayaan pendapatan rumahtangga lewat kelompok masyarakat. KUBE merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. Tujuan penelitian untuk mengetahui besarnya pengaruh dari Program PKH dan KUBE terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode analisis yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian variasi perubahan peningkatan kesejahteraan rumahtangga 65,4% disebabkan oleh variasi perubahan jumlah bantuan sosial (PKH dan KUBE) yang diterima rumahtangga. 34,6% disebabkan oleh bantuan-bantuan sosial lainnya yang diberikan pemerintah baik pusat dan daerah pada Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Kata Kunci : PKH, KUBE dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

The intended social assistance is the FHP (Family Hope Program) program that is given to poor households to help with the burden of household expenses, especially in relation to education and health. FHP as conditional aid program to open access of poor families, especially pregnant women and children to take advantage of a variety of health care facilities and education services available. FHP also provides protection for persons with disabilities and elderly people. FHP becomes the epicenter and center of excellence for poverty alleviation. The KUBE (Joint Business Group) program is provided to empower household income through community groups. KUBE is a group of poor families formed, growing, and developing on their initiative in implementing Productive Economic Enterprises (UEP) to increase family income and social welfare. The research objective was to determine the magnitude of the influence of the PKH and KUBE Program on improving the welfare of the community in Southeast Minahasa Regency. The analytical method used is Ordinary Least Square (OLS). The results of research on changes in changes in household welfare 65.4% caused by variations in changes in the amount of social assistance (FHP and KUBE) received by households. 34.6% was due to other social assistance provided by the central and regional government to Beneficiary Families in Southeast Minahasa Regency.

Keyword : FHP, KUBE and Public welfare

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah, tergantung pada tingkat pertumbuhan ekonominya sebaliknya kondisi perlambatan ekonomi daerah menimbulkan berbagai permasalahan sampai ke level perdesaan. Lewis theory menekankan pertumbuhan ekonomi perdesaan (*rural*) melalui proses *labor transfer* dan mekanisme interaksi antara rural dan urban (*Dynamics Model for Rural and Urban Economic Growth*). Ini menjadi dasar perlu adanya paradigma baru dalam pembangunan daerah untuk optimalisasi peran masyarakat dalam pembangunan. Perlu ada pembangunan daerah yang menciptakan pertumbuhan dan pemerataan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi daerah idealnya merupakan akumulasi peningkatan pendapatan masyarakat.

Upaya peningkatan pendapatan masyarakat merupakan salah satu bagian penting menjaga kestabilan perekonomian rumahtangga dari gejala perlambatan perekonomian. Kuznets memperkenalkan pemikirannya tentang tingkat pendapatan dengan tingkat keberhasilan pembangunan yang berbentuk pola U-terbalik (*inverted U shaped pattern*).Selanjutnya terdapat Indeks Gini yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan dan tingkat kesejahteraan antar rumahtangga (Todaro,2006)

Pemerintah daerah melalui berbagai program pembangunan antara lain melalui strateginya termasuk dalam pemberian bantuan social. Program perlindungan sosial di sebut Conditional Cash Transfer (CCT). Di Indonesia terutama untuk penanganan prasejahtera diantaranya RTLH, RS-RUTILAHU, SARLING, KUBE, PKH, KIP, KIS, Kartu Tidak Mampu, RASTRA, PBI, program satu juta rumah, subsidi bunga untuk usaha mikro dan kecil, dan sebagainya. Tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga Negara.

Evaluasi beberapa program pemberdayaan tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan termasuk pelaksanaan kebijakan sosial pemerintah melalui pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat belum optimal di berbagai daerah. Dalam penelitian ini mengangkat isu pemberian bantuan sosial PKH dan KUBE pada rumahtangga di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Bantuan sosial yang dimaksud adalah program PKH (Program Keluarga Harapan) yang diberikan pada rumahtangga miskin untuk membantu beban pengeluaran rumahtangga terutama berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan. PKH sebagai program bantuan bersyarat membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan layanan pendidikan yang tersedia. PKH juga memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. PKH menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan.

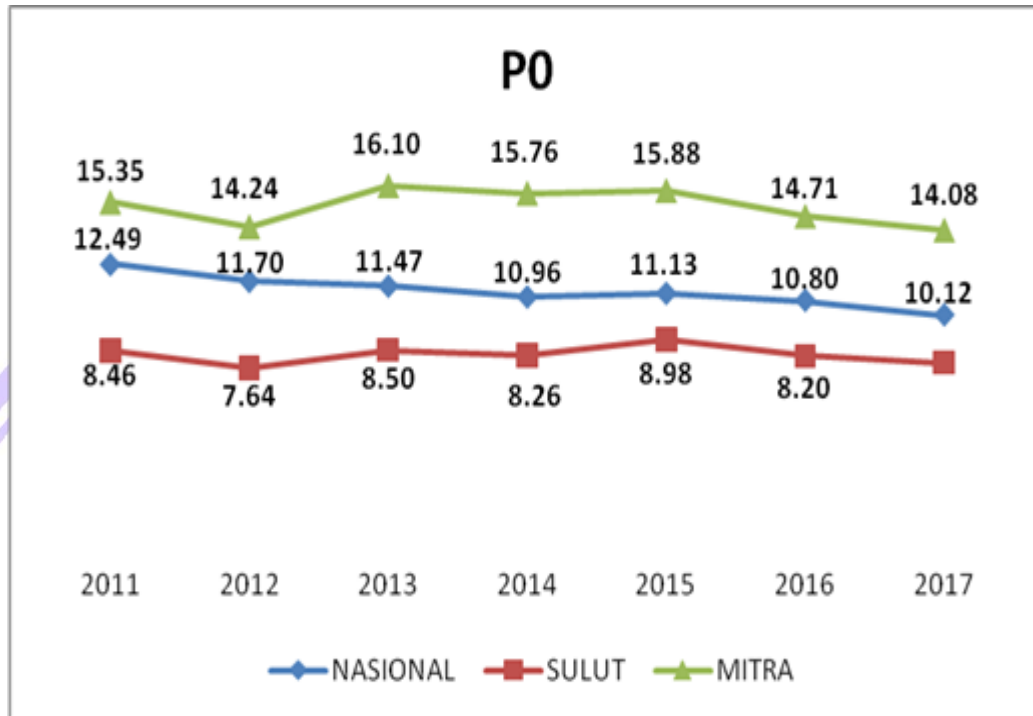
Juga terdapat program KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang diberikan untuk pemberdayaan peningkatan rumahtangga lewat kelompok masyarakat. KUBE merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.

Kabupaten Minahasa Tenggara dalam 5 (lima) tahun kedepan tetap memprioritaskan pemberdayaan masyarakat juga penguatan UMKM menuju Mitra yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian. Berdasarkan arahan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, pemberdayaan masyarakat merupakan program prioritas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai ke Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Program Prioritas Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Program Penurunan Ketimpangan Daerah menjadi program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara 2019-2023.

Program PKH dan KUBE termasuk pada program prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan sehingga isu kemiskinan dalam rumahtangga juga menjadi bagian dalam penelitian ini.

Perbandingan persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia, Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa Tenggara dapat dilihat pada Gambar 1

Gambar 1
Perbandingan Persentase Jumlah Penduduk Miskin (PO) Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2011 - 2017



Sumber : BPS Provinsi SULUT

Data menunjukkan bahwa selang tahun 2011 sampai 2017 persentase penduduk miskin (PO) di Kabupaten Minahasa Tenggara berada di atas nilai provinsi dan nasional. Fenomena ini membuat penulis mengangkat masalah kemiskinan sebagai topik penelitian. Pemerintah pusat menetapkan beberapa program prioritas penanggulangan kemiskinan yang dilakukan sampai ke level kabupaten kota. Beberapa program nasional sampai daerah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Program PKH dan Program KUBE.

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI

Tabel 1
Penerima PKH di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2019

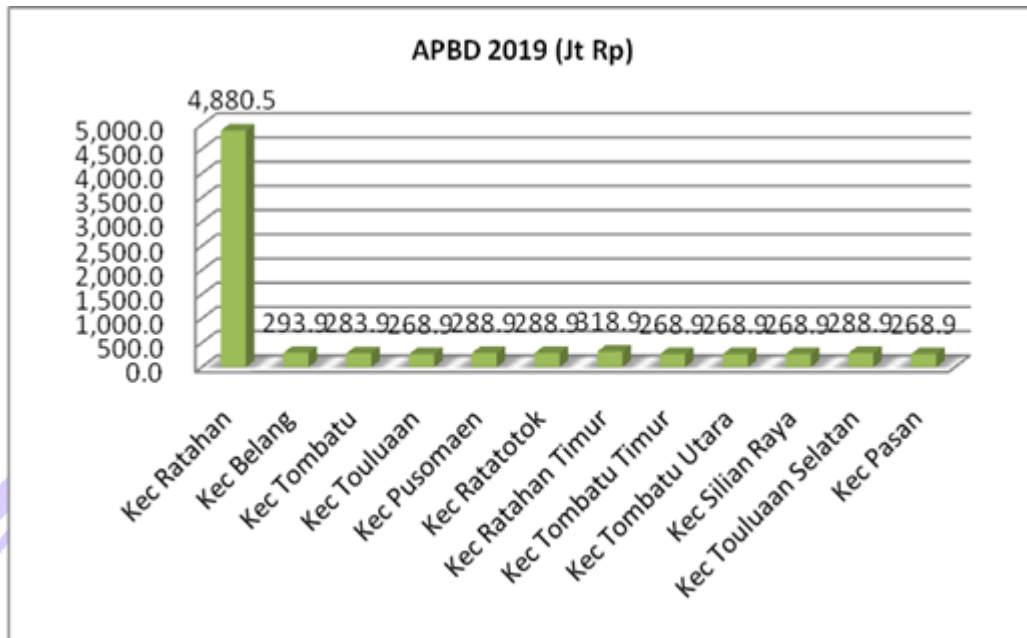
KECAMATAN	TAHAP I 2019		TAHAP II 2019		TAHAP III 2019	
	KPM	Jumlah	KPM	Jumlah	KPM	Jumlah
BELANG	808	1,001,550,000	789	563,300,000	718	557,900,000
PASAN	341	423,275,000	342	242,800,000	300	218,675,000
PUSOMAEN	629	804,725,000	620	453,900,000	603	482,425,000
RATAHAN	526	661,975,000	518	379,075,000	489	373,275,000
RATAHAN TIMUR	202	250,950,000	200	138,800,000	194	143,575,000
RATATOTOK	635	778,875,000	634	433,325,000	541	414,500,000
SILIAN RAYA	279	357,000,000	272	198,625,000	264	232,625,000
TOMBATU	378	547,475,000	371	339,025,000	325	313,150,000
TOMBATU TIMUR	365	457,725,000	354	253,100,000	334	256,550,000
TOMBATU UTARA	295	374,500,000	296	214,050,000	261	230,325,000
TOULUAAN	304	372,850,000	302	204,475,000	256	204,050,000
TOULUAAN SELATAN	357	481,050,000	341	282,000,000	280	212,575,000
	5,119	6,511,950,000	5,039	3,702,475,000	4,565	3,639,625,000

Sumber : Dinas Sosial Kab. Minahasa Tenggara

Pembagian PKH setiap tahunnya terbagi atas 4 tahapan dengan berbagai kriteria yang telah ditetapkan bagi keluarga penerima manfaat program. Untuk tahun 2019 dalam 3 (tiga) tahapan yang ada terjadi penurunan penerima manfaat dari 5.119 keluarga menjadi 4.565 keluarga dengan jumlah bantuan dana sebesar 6,5 miliar rupiah menjadi 3,6 miliar rupiah. Tersebar di 12 kecamatan yang ada dengan daftar penerima terbanyak di Kecamatan Belang (15,7%), Kecamatan Pusomaen (13,2%) dan Kecamatan Ratatotok (11,8%).

Dilihat dari alokasi anggaran tahun 2019 tampak bahwa Kecamatan Belang menerima anggaran terbesar dan jauh melampaui anggaran di kecamatan lainnya. Hal ini menjadi isu menarik yang akan diangkat berhubungan dengan alokasi anggaran dan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi eksisting setiap kecamatan. Serta berbagai program prioritas pembangunan yang sejalan dengan distribusi anggaran terutama dalam penelitian ini berhubungan dengan pemberian bantuan sosial kepada rumah tangga miskin di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Gambar 2
Alokasi APBD Tahun 2019 per Kecamatan



Sumber : Bappeda Kab.Minahasa Tenggara

Sesuai dengan tema pembangunan daerah tahun 2020 yaitu “memantapkan daya saing melalui pemerataan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia yang berkualitas”. Pemerintah daerah dalam prioritas pembangunannya terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini yang menyebabkan program PKH dan KUBE yang menjadi prioritas nasional juga menjadi prioritas di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh Program PKH terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara ?
2. Bagaimanakah pengaruh Program KUBE terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara ?
3. Bagaimanakah pengaruh Program PKH dan KUBE terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui besarnya pengaruh dari Program PKH terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Mengetahui besarnya pengaruh dari Program KUBE terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Mengetahui besarnya pengaruh dari Program PKH dan KUBE terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tentang pengaruh program-program bantuan sosial terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Menjadi bahan evaluasi bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang mengangkat topik peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam penelitiannya.

Landasan Teori

Pemberdayaan Masyarakat

Berbagai upaya yang dilakukan dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan kesenjangan, dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi kelompok tertinggal. Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo, 2006). Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan program JPS (Jaring Pengaman Sosial). Program JPS sebagai payung dari strategi dan langkah kebijaksanaan khusus dan reguler dengan pemberdayaan masyarakat sebagai langkah kebijaksanaan yang nyata dalam mewujudkan peran serta aktif masyarakat. Program JPS dirancang untuk membantu rakyat miskin yang terkena dampak akibat krisis ekonomi dan dilaksanakan melalui tahapan penyelamatan dan pemulihan menuju pada kondisi yang normal.

Setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat paling tidak harus memuat unsur-unsur pokok sebagai berikut: (i) strategi dasar pemberdayaan masyarakat yang merupakan acuan dari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat; (ii) kerangka makro pemberdayaan masyarakat yang memuat berbagai besaran sebagai sasara yang harus dicapai; (iii) sumber anggaran pembangunan sebagai perkiraan sumber-sumber pembiayaan pembangunan; (iv) kerangka dan perangkat kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat; (v) program program pemberdayaan masyarakat yang secara konsisten diarahkan pada pengembangan kapasitas masyarakat; (vi) indikator keberhasilan program yang memuat perangkat pencatatan sebagai dasar pemantauan evaluasi program dan penyempurnaan program serta kebijaksanaan yang menjamin kelangsungan program.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash*

Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan dimana pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (*gini ratio*) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak terhadap perubahan konsumsi rumah tangga, seperti di beberapa negara pelaksana CCT lainnya. PKH berhasil meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima manfaat di Indonesia sebesar 4,8%.

KPM PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH di bidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang sekolah dasar dan menengah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mulai 60 tahun.

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

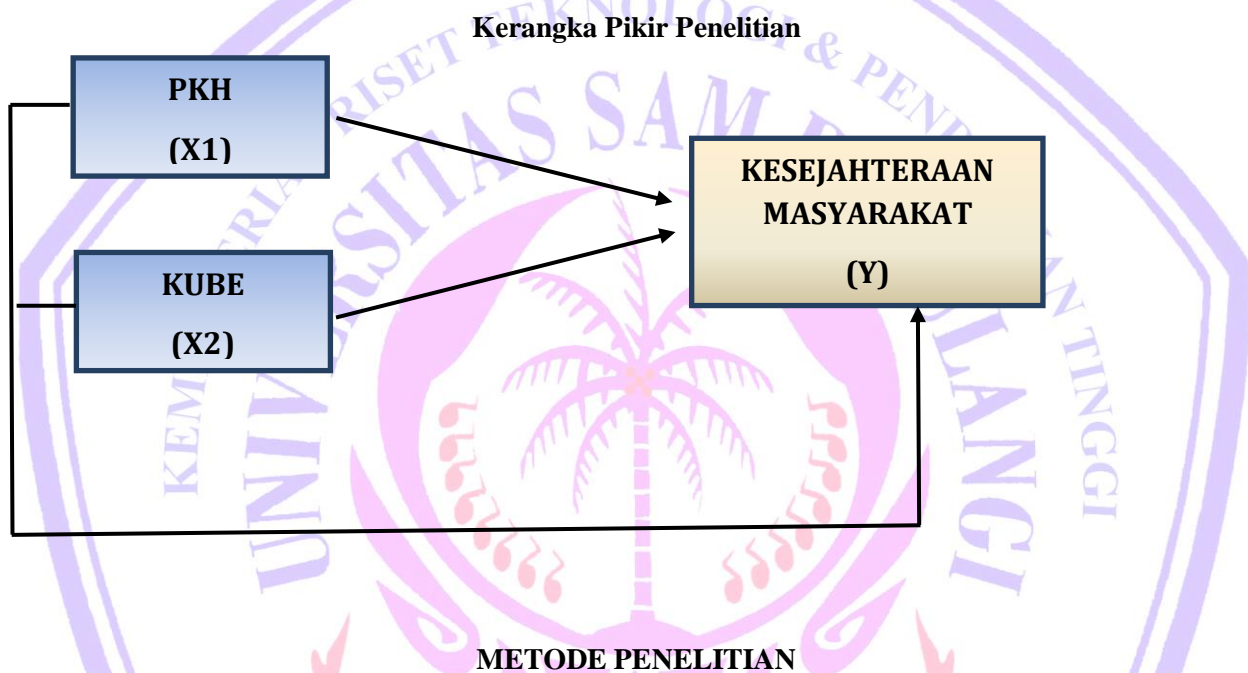
Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Digantikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan masyarakat miskin. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disebut UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 20 (dua puluh) kepala keluarga. Pengurus KUBE terdiri atas: ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok. Pembentukan KUBE difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Pasal 4 menyatakan anggota KUBE harus memenuhi kriteria miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi serta harus masuk dalam data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu. Syaratnya adalah :

- a. kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga;

- b. telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
- c. berdomisili tetap dan memiliki identitas diri; dan
- d. memiliki potensi dan keterampilan.

UEP diberikan kepada KUBE berupa uang dimana paling sedikit senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kelompok. Menurut pasal 12 UEP dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas yang dijalankan oleh KUBE. Pemanfaatan UEP oleh KUBE dilaksanakan sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya yang sah. Pemanfaatan UEP tidak dapat digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, honorarium pengurus, serta kegiatan politik dan hal lain yang tidak terkait dengan produktivitas KUBE.



Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan adalah data BPS untuk kondisi makro ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. Data sekunder lainnya diperoleh dari instansi-instansi terkait yang memberikan bantuan PKH dan KUBE di Kabupaten Minahasa Tenggara. Serta data primer dengan melakukan survey kepada rumah tangga target penerima program manfaat pemerintah daerah. Sampel yang digunakan adalah 140 rumahtangga penerima manfaat di 5 (lima) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Ratahan, sampel terdiri dari Kelurahan Lowu Satu, Kelurahan Tosuraya Barat, Kelurahan Lowu Utara, Kelurahan Wawali, dan Kelurahan Wawali Pasan).
2. Kecamatan Ratahan Timur, sampel terdiri dari Desa Pangu, Desa Pangu Dua, Desa Wioi Timur, Desa Wioi dan Desa Wioi Satu.
3. Kecamatan Pusomaen, sampel terdiri dari Desa Tumbak, Desa Tumbak Madani, Desa Minanga, Desa Minanga Satu, Desa Minanga Dua.
4. Kecamatan Ratatotok sampel terdiri dari Desa Ratatotok Timur, Desa Ratatotok Muara, Desa Ratatotok Dua, Desa Ratatotok Tenggara dan Desa Ratatotok Satu.

5. Kecamatan Belang sampel terdiri dari Desa Molompar Induk, Desa Molompar Utara, Desa Watuliney, Desa Watuliney Tengah, dan Desa Watuliney Indah.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Kesejahteraan masyarakat diproksi dengan pendapatan masyarakat yang merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh individu kepala rumahtangga dalam satu rumahtangga diukur dalam rupiah.

1. Program PKH adalah program pemerintah pusat dan daerah untuk masyarakat miskin di Kabupaten Minahasa Tenggara diukur dalam Rupiah.
2. Program KUBE adalah program pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara diukur dalam Rupiah.

Metode Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linear berganda pada dasarnya adalah studi ketergantungan *variable dependent* (terikat) dengan satu atau lebih *variabel independent* (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati,2003).

Adapun formula untuk metode Analisis Regresi Berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana :

- Y = Jumlah Pendapatan Masyarakat
- X₁ = Program PKH
- X₂ = Program KUBE
- b₀ = Konstanta
- b_{1,2} = Koefisien regresi untuk variabel X₁ dan X₂

Dengan analisis regresi akan diketahui kekuatan dan arah hubungan antara variabel dependen yaitu pendapatan masyarakat dengan variabel independen program PKH dan program KUBE. Teknik estimasi variabel dependen yang melandasi analisa regresi tersebut dinamakan *Ordinary Least Square* (OLS).

Koefisien Korelasi (r) digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel (Y). Untuk mengukur kuatnya hubungan (korelasi) antara dua variabel X diberi symbol *r_{xy}* atau r saja. Nilai letaknya antara -1 dan 1, nilai r = 1, berarti hubungan X dan Y sempurna dan positif. Nilai r = 0, berarti hubungan X dan Y lemah sekali atau tidak ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, naik turunnya X tidak dipengaruhi Y, sedangkan, kalau hubungannya positif, pada umumnya kenaikan (penurunan) X, menyebabkan kenaikan (penurunan) Y, sebaliknya untuk hubungan yang negatif pada umumnya kenaikan (penurunan) X menyebabkan penurunan (kenaikan) Y. (Widarjono, 2013).

Koefisien Determinasi (R²) adalah suatu besaran yang lazim dipakai untuk mengukur kebaikan kesesuaian (*goodness of fit*), yaitu bagaimana garis regresi mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. Selanjutnya dilakukan pengukuran yaitu seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independen. Formula untuk menghitung koefisien determinasi (R²) regresi sederhana. R² =

$$\frac{ESS}{TSS} = \frac{TSS-SSR}{TSS}, R^2 = 1 - \frac{ESS}{TSS} = 1 - \frac{\sum e_i^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2} \text{ (Widarjono 2013 : 24)}$$

Besarnya koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 (nol) besarnya koefisien determinasi (r^2) suatu persamaan regresi, semakin kecil hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya mendekati 1 (satu) besarnya koefisien determinasi (r^2) suatu persamaan regresi, semakin besar hubungan variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini menggunakan tiga uji asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Adanya Multikolinieritas dapat dengan metode VIF (*variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Model regresi yang normal yang memiliki batas angka *tolerance* lebih kecil dari 1, sedangkan batas angka untuk VIF adalah lebih kecil dari 10 .

2. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan “pengganggu” pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terdapat korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Uji Autokorelasi menggunakan uji *Lagrange Multiplier* (LM). Jika nR^2 yang merupakan *chi-squares* (X^2) hitung lebih besar dari nilai kritis *chi-squares* (X^2) pada derajat kepercayaan tertentu (α), kita menolak hipotesis nol H_0 . Hal ini berarti paling tidak ada satu p dalam persamaan secara statistik signifikan tidak sama dengan nol. Ini merupakan ada masalah Autokorelasi dalam model. Sebaliknya jika nilai *chi-squares* hitung lebih kecil dari nilai kritisnya maka kita gagal menolak hipotesis nol. Artinya model tidak mengandung unsur autokorelasi karena semua nilai p sama dengan nol.

Penentuan ada tidaknya autokorelasi juga bisa dilihat dari nilai probabilitas *chi-squares* (X^2). Jika nilai probabilitas lebih besar dari α yang dipilih maka kita gagal menolak H_0 yang berarti tidak ada autokorelasi. Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai α yang dipilih maka kita menolak H_0 yang berarti ada masalah Autokorelasi (Widarjono, 2013).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas adalah dengan: Uji *White*: H_0 = Heteroskedastisitas Jika nilai *chi-square* hitung lebih besar dari nilai X^2 kritis dengan derajat kepercayaan tertentu (α) maka ada heteroskedastisitas dan sebaliknya jika *chi-square* hitung lebih kecil dari nilai X^2 kritis menunjukkan adanya heteroskedastisitas (Widarjono, 2013)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dianalisis lebih lanjut, data yang digunakan adalah data survey yang merupakan sampel dengan metode simple random sample pada 5 (lima) kecamatan dengan total sampel 140 responden di uji secara statistik dengan beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	1241071.42	3131.32	140
X1	575884.35	148652.80	140
X2	1241071.42	322159.29	140

Data yang digunakan terdiri atas 140 rumahtangga atau N = 140, dengan rata-rata masing variabel menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumahtangga adalah 1.241.071 juta rupiah per bulan dengan rata-rata jumlah bantuan PKH yang diterima sebesar 575.884 rupiah per bulan, dan rata-rata jumlah bantuan KUBE yang diterima 1.241.071 rupiah per rumahtangga.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
(Constant)	4628010.04	9177190.66			
1 X1	1.34438	5.18959	.007	.740	1.351
X2	1.75045	.109317	-.019	.695	1.438

a. Dependent Variable: Y

Hasil run data menunjukkan bahwa model dengan 2 variabel bebas memiliki nilai *tolerance* di bawah 1 dan nilai *variance inflation factor* di bawah 10. Ini berarti bahwa tidak terdapat multikolinearity pada data yang diolah sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.809 ^a	.654	.649	190722.62	1.129

a. Predictors: (Constant), X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Selanjutnya diperoleh bahwa untuk uji regresi linear berganda dengan 2 variabel independen dan 1 variabel dependen, jumlah sampel rumahtangga sebanyak 140, di dapatkan Durbin Watson d= 1,129, artinya tidak ada masalah autokorelasi.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4628010.04	9177190.66		.146	.764
X1	1.34438	5.18959	.007	0.25905	.157
X2	1.75045	.109317	-.019	16.012	.3.49E-33

a. Dependent Variable: RES2

Dari output diatas diperoleh bahwa table signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Estimasi Model Penelitian

Sampel jumlah rumahtangga pada 5 (lima) kecamatan dan 5 (lima) kelurahan serta 20 desa di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah mereka yang menerima bantuan PKH. Penerima manfaat PKH adalah mereka yang masuk dalam kelompok rumahtangga miskin sehingga ini menjadi dasar bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut dampaknya pada kesejahteraan rumahtangga miskin. Hasil run data dengan menggunakan SPSS menunjukkan seperti tabel di bawah ini:

Model	Coefficients	t	Sig
(Constant)	4628010.04	.146	.764
X1	1.34438	0.25905	.157
X2	1.75045	16.012	.3.49E-33
R ² = 0,654		F Statistik = 129.7996	

a. Dependent Variable: Y

Hasil persamaan regresi adalah sebagai berikut :

$$Y = 4628010,04 + 1,34438 X_1 + 1,75045 X_2 + \epsilon$$

- a. Terdapat pengaruh yang sangat signifikan ($\alpha=1\%$) antara bantuan KUBE terhadap peningkatan pendapatan rumahtangga. Terdapat pengaruh yang sigifikan ($\alpha=15\%$) antara bantuan PKH terhadap peningkatan pendapatan rumahtangga. Ini artinya bahwa program bantuan sosial pemerintah yaitu PKH dan KUBE memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mayarakat miskin di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Priadana Sidik (2010) yang keberhasilan KUBE dalam meningkatkan kesejahteraan rumahtangga ditunjang dengan adanya kewirausahaan, kualitas kelembagaan, kecukupan modal dan kemitraan strategis. Penelitian Mutiara Pertiwi (2008) juga membuktikan bahwa program KUBE terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Juga sejalan dengan penelitian Umaroh F dan Sutjiatmi (2010). Dimana perlu alur pelaksanaan PKH secara terbuka dan menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan pemutahiran data.

Berbagai program percepatan penanggulangan kemiskinan harus memperhatikan bagaimana meningkatkan pendidikan formal ataupun informal pada mereka di usia produktif sehingga dapat menjadi sumber bagi peningkatan pendapatan.

- b. Hasil run data menunjukkan bahwa hubungan X_1 dan X_2 adalah positif ini berarti meningkatnya bantuan sosial pemerintah baik PKH dan KUBE pada rumahtangga miskin akan meningkatkan kesejahteraan rumahtangga. Program ini masih perlu dengan lebih memfokuskan rumahtangga target atau keluarga penerima manfaat (KPM) yang tepat sasaran.
- c. Secara parsial besarnya pengaruh bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) lebih besar pengaruhnya (1,75045) terhadap peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan rumahtangga dibandingkan dengan bantuan PKH (1,34438) yang diterima.
- d. Secara bersama-sama bantuan PKH dan KUBE sangat signifikan ($\alpha=1\%$) mempengaruhi peningkatan kesejahteraan rumahtangga.
- e. Korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat adalah sebesar 80,9 %. Terdapat hubungan yang erat antara bantuan sosial pemerintah dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.
- f. Sedangkan variasi perubahan naik turunnya tingkat kesejahteraan secara signifikan dipengaruhi 65,4 % oleh variasi perubahan besarnya dana bantuan sosial (PKH dan KUBE) yang diterima rumahtangga. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Ternyata kesejahteraan rumahtangga tidak hanya membutuhkan bantuan dana yang dapat digunakan untuk membantu beban pengeluaran rumahtangga namun lebih membutuhkan bantuan modal usaha untuk menciptakan pendapatan yang berkelanjutan.

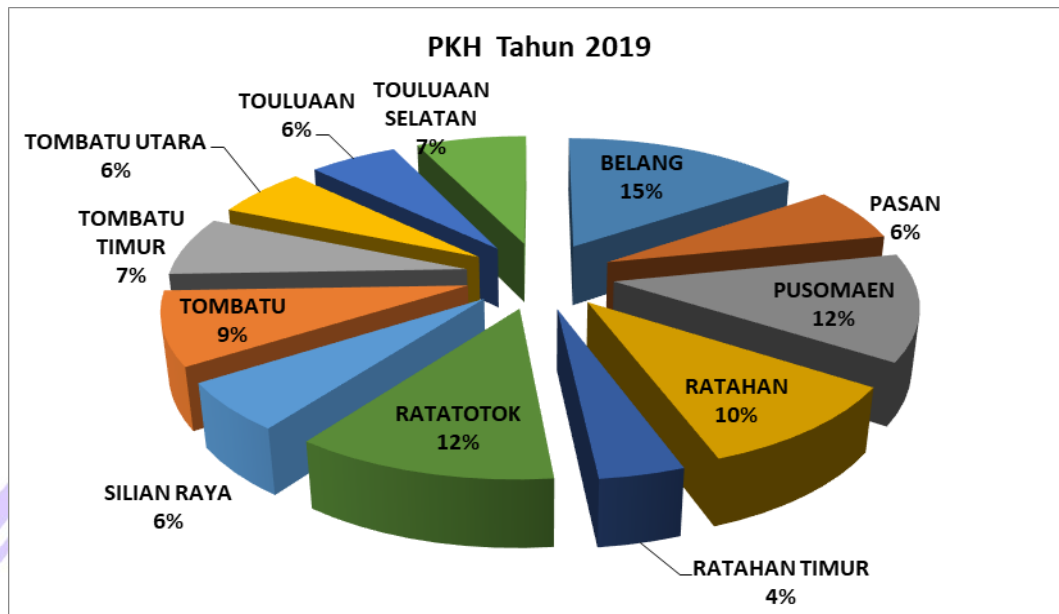
Pembahasan

Kabupaten Minahasa Tenggara dalam perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu tujuan utama pembangunan. Ditahun 2019 ini salah satu prioritas pembangunan daerah adalah percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal ini diusahakan dengan berbagai strategi dan program-program prioritas kemiskinan diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kedua program ini adalah program pemerintah pusat sehingga daerah penerima harus mampu mengoptimalkan manfaatnya bagi kesejahteraan rumahtangga.

Kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai keputusan Mensos Nomor 146 Tahun 2013, adalah sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau tidak mampumemenuhi kebutuhan dasar.
2. Pengeluaran sebagian besar digunakan untuk konsumsi makanan pokok sangat sederhana.
3. Tidak mampu berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yg disubsidi pemerintah.
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun .
5. Hanya menyekolahkan anak sampai SLTP
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/ kayu/ semen/ keramik dengan kondisi tidak baik, termasuk tembok yg sudah usang/ berlumut atau tembok tidak diplester.
7. Kondisi lantai terbuat dari kayu/semen/ keramik dengan kondisi tidak baik.

Gambar 3
Keluarga Penerima Manfaat PKH di Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2019



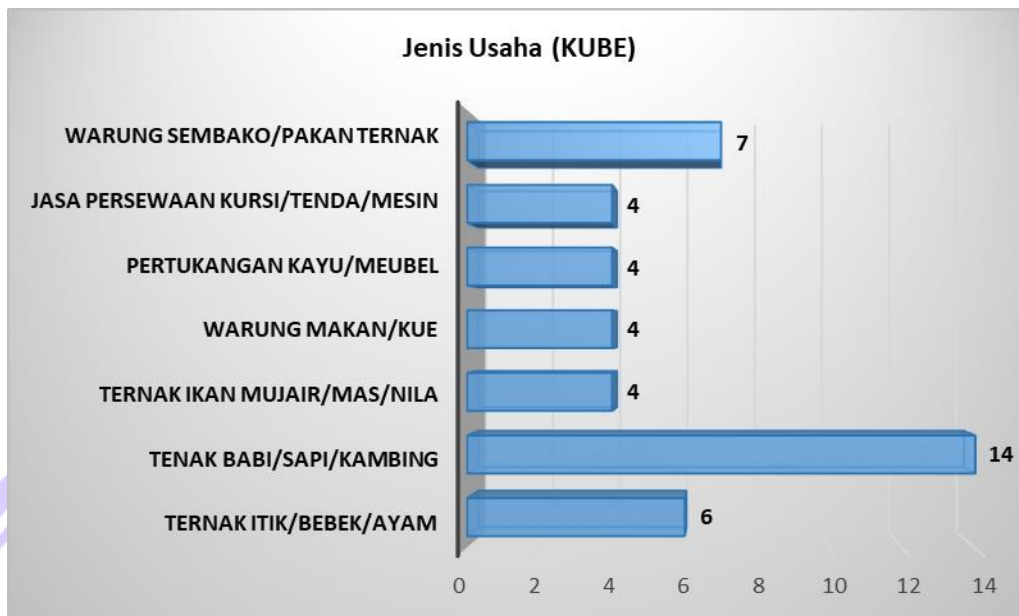
Sumber : Dinas Sosial Kab. Minahasa Tenggara

Data menunjukkan bahwa keluarga penerima manfaat PKH paling banyak (15%) terdapat di Kecamatan Belang diikuti oleh Kecamatan Ratatotok (12%), Kecamatan Pusomaen (12%) dan Kecamatan Ratahan (10%). Keempat kecamatan ini menjadi pilihan sampel peneliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian dengan menggunakan sampel pada 140 rumah tangga penerima PKH dan KUBE di Kabupaten Minahasa Tenggara menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Bahkan dibuktikan bahwa perlu lebih diperbanyak bantuan KUBE yang diberikan pada kelompok usaha dibandingkan dengan bantuan PKH yang diberikan pada rumah tangga, karena dampaknya lebih besar dan signifikan bagi peningkatan kesejahteraan.

Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2019 ditetapkan dengan keputusan kuasa pengguna anggaran Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Nomor 634 tahun 2019 tentang Pencairan Dana Bantuan Stimulan KUBE bagi 428 Kpm di Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019. Penerima bantuan social adalah sebesar 2 juta rupiah setiap anggota (maksimum 10 anggota per kelompok).

Gambar 4.
Keluarga Penerima Manfaat KUBE di Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2019



Sumber : Dinas Sosial Kab. Minahasa Tenggara

Jenis usaha yang terbanyak dari 43 kelompok usaha penerima KUBE tahun 2019 adalah usaha peternakan yang terdiri atas ternak babi (10 kelompok), dan ternak sapi dan kambing masing-masing 2 kelompok. Warung sembako dan pakan ternak terdapat 7 kelompok, juga ternak itik/ayam/bebek 6 kelompok (masing-masing terdiri atas 2 kelompok).

Bantuan 15social pemerintah kepada masyarakat yang dipilih oleh peneliti memiliki hubungan yang erat dengan masalah kemiskinan karena bantuan PKH hanya diberikan pada rumahtangga miskin bahkan rumahtangga sangat miskin. Ini berarti bahwa secara tidak langsung pemberian bantuan KUBE yang digunakan sebaik-baiknya akan ikut mensukseskan target pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mengurangi angka kemiskinan yang masih tinggi.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak membandingkan rumahtangga yang hanya menerima salah satu bantuan PKH atau KUBE dengan rumahtangga yang menerima kedua bantuan tersebut ataupun membuka *dummy variable* bantuan 15social lainnya yang diterima oleh rumahtangga. Hal ini bisa menjadi isu menarik bagi penelitian selanjutnya untuk memperkaya informasi pengaruh dari berbagai bantuan 15social pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan berbagai bantuan 15social pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD Tahun 2018-2023 menetapkan isu peningkatan kesejahteraan 15social masyarakat sebagai salah satu isu strategis pemerintah daerah. Hasil penelitian ini memberikan informasi yang penting dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian pembahasan maka disimpulkan bahwa :

1. Secara parsial peningkatan bantuan PKH pada rumahtangga memberi pengaruh yang signifikan ($\alpha=15\%$) pada peningkatan kesejahteraan rumahtangga di Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Secara Parsial peningkatan bantuan KUBE pada rumahtangga memberi pengaruh yang signifikan ($\alpha=1\%$) pada peningkatan kesejahteraan rumahtangga di Kabupaten Minahasa Tenggara.
3. Secara bersama-sama peningkatan bantuan PKH dan KUBE pada rumahtangga memberikan pengaruh sangat signifikan ($\alpha=1\%$) pada peningkatan kesejahteraan rumahtangga di Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Variasi perubahan peningkatan kesejahteraan rumahtangga 65,4% disebabkan oleh variasi perubahan jumlah bantuan sosial (PKH dan KUBE) yang diterima rumahtangga. 34,6% disebabkan oleh bantuan-bantuan sosial lainnya yang diberikan pemerintah baik pusat dan daerah pada Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Implikasi Kebijakan

Beberapa implikasi kebijakan yang dapat disarankan sesuai hasil penelitian, yaitu diantaranya :

1. Program Bantuan Sosial yang bersifat membantu pengeluaran rumahtangga harus benar-benar tepat sasaran, sehingga manfaatnya akan lebih besar sesuai dengan kebutuhan rumahtangga.
2. Program Bantuan Sosial yang bersifat memberdayakan rumahtangga harus lebih banyak diberikan pada kelompok-kelompok usaha produktif yang menghasilkan produk-produk unggulan daerah.
3. Pentingnya validasi data keluarga penerima manfaat yang berkelanjutan untuk meminimalkan bias program prioritas daerah.

Bentuk kalimat “ Implikasi Kebijakan” sebagai berikut:

- Program bantuan social berfungsi pelengkap bagi pengeluaran rumah tangga, sebaiknya dibarengi dengan penyuluhan tentang kemandirian ekonomi agar supaya dapat memperkuat persepsi masyarakat tentang kemandirian ekonomi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widarjono. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*, Ekonosia, Jakarta.
- Gujarati, Damodar, (1999), *Essential of Econometrics*, second edition, McGraw-Hill Int.edition, Economies series.
- Gujarati D.N & Porter D.C, (2009), *Basic Econometrics*, fifth edition, Mc. Graw Hill Int. edition, New York.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mubarak Z, 2010, *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*, UNDIP, Semarang.
- Soetomo, 2006, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Todaro, Michael P, (2006), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, edisi kesembilan, Penerbit Erlangga, Jakarta.